

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak menjadi salah satu kontribusi yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah tanpa adanya suatu perjanjian untuk mendapatkan pengembalian yang proporsional. Dari segi perekonomian, pajak juga diartikan sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor publik (Suandy, 2008). Hal ini terlihat dari bagaimana pengurangan penerimaan pajak di suatu negara dapat memengaruhi seluruh pendapatan negara. Di Indonesia, fungsi pajak sangatlah dominan terhadap penerimaan pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat melalui total penerimaan pajak pada APBN tahun 2017 mencapai Rp 1.472,7 triliun, dan juga diimbangi dengan meningkatnya *tax ratio* Indonesia yang semula hanya 10,8% naik menjadi 10,9% (Asmara, 2018), namun jumlah ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lain seperti Thailand sebesar 15,7%, Kamboja 15,3%, Singapura 14,3%, Malaysia 13,8%, dan Filipina 13,7% (Daily, 2018). Keinginan pemerintah untuk memaksimalkan penghasilan dari sektor pajak bukanlah hal yang mudah, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* atau bahkan *tax evasion*.

Menurut Septiadi dan Darussalam (2008) kebocoran pada pendapatan pajak sangat mungkin dilakukan dari berbagai sisi. Kebocoran tersebut terjadi di beberapa titik antara lain, penghasilan dari aset yang disimpan di negara *offshore* sehingga tidak dapat dikenakan pajak, penghasilan yang disimpan di negara lain, dan

kebocoran akibat *tax competition* (Desiyana., 2012). Kebocoran yang paling banyak terjadi yaitu perusahaan multinasional yang mentransfer labanya melalui praktik *tax avoidance* dan memanfaatkan negara *tax haven* (Nurhidayati, 2018). Praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan negara *tax haven* ini menjadi masalah bagi Indonesia, karena dapat memengaruhi jumlah penerimaan pajak bagi negara. Praktik *tax avoidance* dilakukan untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan dengan skema yang mengacu pada wilayah dengan tarif pajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak rendah (*tax haven*) melalui mekanisme *income shifting* (Frandyanto, 2017).

Di beberapa negara seperti Kanada dan Israel telah membuat suatu ketentuan untuk mencegah praktik *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak (Irfansyah, 2010). Dalam konteks perpajakan internasional, skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan dan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak melalui negara *tax haven* adalah *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *intangible asset*. Menurut Nurhidayati (2018), negara *tax haven* memberikan fasilitas perpajakan secara luwes dan memungkinkan para wajib pajak untuk mentransfer pendapatan mereka demi membayar pajak lebih rendah atau tidak dikenai pajak sama sekali.

Pemanfaatan negara *tax haven* didorong oleh berbagai faktor antara lain mencari biaya tenaga kerja yang rendah, terjaganya kerahasiaan dari investor, dan juga penghindaran pajak. Pihak investor yang memanfaatkan negara *tax haven* dapat mengurangi beban pajak perusahaan, namun disisi lain keberadaan negara *tax haven* dapat mengganggu reputasi perusahaan apabila tujuannya untuk pengalihan

laba. Perusahaan *offshore* yang berada di negara *tax haven* sangat lekat dengan industri kerahasiaan dimana asal usul kepemilikan, maupun penikmat manfaat dari suatu aset maupun transaksi keuangan tidak mudah dilacak. Pemanfaatan negara *tax haven* mulai muncul ketika bocornya dokumen yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berisi jutaan dokumen investasi *offshore* yang juga mencantumkan beberapa perusahaan Indonesia yang terlibat dalam kasus *Panama Papers*. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang maksimalnya negara dalam pengawasan perpajakan sehingga memungkinkan perusahaan Indonesia untuk melakukan *income shifting* ke negara *tax haven*. Menurut Richardson dan Taylor (2015) praktik *income shifting* yang dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai instrumen, seperti *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *intangible assets* (Richardson dan Taylor, 2015).

Instrumen *multinationality* dapat dilihat dari adanya perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan lain yang berada di luar negeri. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, keberadaan perusahaan afiliasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan melakukan ekspansi bisnis yang akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan. Dengan menggunakan perusahaan afiliasi, perusahaan multinasional dapat memperluas pasar sekaligus mencari bahan baku yang tidak diperoleh di negara asalnya ataupun mencari tenaga kerja dengan biaya yang rendah untuk mengurangi biaya produksi. Pada kenyataannya, keberadaan perusahaan afiliasi ini justru dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan mekanisme penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan multinasional memungkinkan mengalihkan labanya pada perusahaan afiliasi yang

beroperasi di negara lain karena pajak yang dikenakan tergolong lebih rendah (Klassen, 1993).

Praktik *income shifting* yang kedua yaitu perusahaan multinasional yang memanfaatkan transaksi lintas negara melalui mekanisme *transfer pricing* dalam tujuan penghindaran pajak. Kebijakan *transfer pricing* dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran apabila perusahaan memanipulasi harga transfer dengan tujuan untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Ketika terdapat perbedaan tarif yang dikenakan di Indonesia dan negara *partner* maka dapat memicu perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sehingga perusahaan di Indonesia tidak perlu membayar pajak dengan alasan merugi.

Praktik *income shifting* yang ketiga melalui praktik *thin capitalization* yaitu memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi pada perusahaan afiliasi (Nurhidayati, 2018). Pada umumnya ketentuan perpajakan mengatur bahwa pembayaran bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*), ketentuan ini kemudian dieksploitasi dengan cara pemberian pinjaman dengan jumlah yang melebihi kewajaran (Kurniawan, 2018). Praktik *thin capitalization* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam melakukan *tax avoidance*, karena hutang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui adanya beban bunga yang dapat mengurangi pajak penghasilan perusahaan yang dibayarkan (Modigliani, 1963). Semakin tinggi level utang dalam perusahaan, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan yang berakibat pada rendahnya laba fiskal perusahaan.

Praktik *income shifting* yang terakhir melalui *intangible assets*. Kebijakan perpajakan juga harus memperhatikan kemungkinan adanya *income shifting* melalui transfer *intangible assets* (Gravelle, 2009). *The U.S Treasury Department* (2007) menyatakan bahwa terdapat risiko *tax erosion* yang besar melalui transfer aset tidak berwujud antar entitas yang terletak di wilayah pajak yang tinggi dengan wilayah dengan pajak yang rendah. Aset tidak berwujud memiliki nilai yang unik sehingga dapat dimanfaatkan secara bersamaan oleh perusahaan dalam berbagai wilayah. Oleh karena itu, terdapat celah yang cukup besar bagi perusahaan untuk terlibat dalam *income shifting* melalui transfer aset tidak berwujud ke wilayah pajak rendah seperti *tax havens* (Dyreng *et al.*, 2008).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Richardson dan Taylor (2015) mengenai *income shifting* pada perusahaan multinasional Amerika Serikat menemukan bahwa *multinationality*, berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven* di wilayah Caribbean, British Virgin Island, Indian, dan Mediteranian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2018) terkait praktik *income shifting* pada perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh negatif signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Akamah, *et al.* (2017) mengenai *tax haven* dengan objek perusahaan Amerika Serikat yang tergabung dalam *database* Compustat menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan wilayah *tax haven*. Penelitian yang juga dilakukan oleh Omar (2015) terkait pengalihan laba pada perusahaan multinasional di Malaysia menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Hasil penelitian yang

dilakukan Frandyanto (2017) terkait instrumen pengalihan laba pada perusahaan multinasional di Indonesia menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh positif signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Hasil penelitian yang dilakukan Davies (2018) pada perusahaan multinasional di Perancis terkait *transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang memanfaatkan negara *tax haven* menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2018) pada perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh tidak signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Desiyana (2012) juga meneliti terkait penghindaran pajak lintas negara dengan objek perusahaan manufaktur terbuka di Indonesia menggunakan skema *transfer pricing* untuk mengalihkan pendapatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Jansky dan Prats (2014) terkait *profit shifting* pada negara *tax haven* dengan objek perusahaan multinasional di India menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pengalihan laba ke negara *tax haven*. Selain itu, Zain (2010) meneliti tentang *transfer pricing* dan *profit shifting* dengan objek perusahaan industri pengolahan minyak di Indonesia dan menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pengalihan laba ke negara *tax haven*.

Penelitian yang dilakukan Omar (2015) menunjukkan bahwa praktik *thin capitalization* di Malaysia berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Selain itu, Rahayu (2010) meneliti terkait penghindaran pajak oleh *Foreign Direct Investment* menunjukkan bahwa skema *thin capitalization* berpengaruh

positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Riandoko (2017) meneliti terkait pengaruh peraturan *thin capitalization* di Indonesia menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Nugroho dan Suryarini (2018) terkait praktik *thin capitalization* di perusahaan multinasional Indonesia membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap perusahaan multinasional di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan Hong dan Smart (2010) mengenai negara *tax haven* menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap negara *tax haven*. Hasil penelitian dari Frandyanto (2017) pada perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan operasi di negara *tax haven*.

Penelitian oleh Richardson (2015) terkait *profit shifting* menunjukkan bahwa *intangible assets* memiliki pengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2018) bahwa *intangible assets* berpengaruh positif signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Penelitian yang dilakukan oleh Deanti (2017) terkait pengaruh *intangible assets* terhadap praktik *transfer pricing* menunjukkan bahwa *intangible assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* di perusahaan multinasional. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammadi *et al.*, (2016) terkait *transfer pricing* untuk *intangible assets* pada perusahaan multinasional menunjukkan bahwa *intangible assets* masih menjadi suatu permasalahan dikarenakan kurangnya transparansi terhadap kepemilikan dan transaksi *intangible*

*assets*. Penelitian Dharmapala (2014) mengenai *profit shifting* menemukan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Penelitian ini mengukur pengaruh strategi *income shifting* terhadap pemanfaatan negara *tax haven* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan pada sektor manufaktur dikarenakan jumlah perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia yang semakin meningkat yang melibatkan transaksi jual beli yang dapat dilakukan dengan lintas negara, perusahaan manufaktur sektor industri merupakan salah satu perusahaan yang berkontribusi besar dalam penerimaan perpajakan di Indonesia, serta terdapat beberapa nama perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia multinasional yang tercantum dalam *Panama Papers*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai pemanfaatan negara *tax haven* dengan variabel independen strategi *income shifting* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan menggabungkan penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Omar (2015) sekaligus menguji secara kuantitatif dari penelitian Richardson dan Taylor (2015) dengan menggunakan objek perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI dari tahun 2015-2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Apakah strategi *income shifting* yang diproksi dengan *multinationality* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI?
2. Apakah strategi *income shifting* yang diproksi dengan *transfer pricing* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI?
3. Apakah strategi *income shifting* yang diproksi dengan *thin capitalization* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI?
4. Apakah strategi *income shifting* yang diproksi dengan *intangible assets* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh *multinationality* terhadap pemanfaatan negara *tax haven*
2. Untuk membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan negara *tax haven*
3. Untuk membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh *thin capitalization* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*
4. Untuk membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh *intangible assets* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan bagi ilmu akuntansi, khususnya pada bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memperbaiki penelitian sebelumnya dan dapat memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *Income Shifting* terhadap negara *Tax Haven*.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan dalam hal perpajakan bagi manajemen dan investor khususnya terkait dalam praktik *income shifting* dengan memanfaatkan negara *tax haven*.